

LAMPIRAN II
Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor : S-40/PB/PB.6/2022
Tanggal : 30 September 2022

**PANDUAN PENYELESAIAN TRANSAKSI DALAM KONFIRMASI
DALAM RANGKA PELAKSANAAN REKONSILIASI EKSTERNAL
MELALUI APLIKASI MONSAKTI**

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki menurut Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah keandalan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016, dalam rangka meyakinkan keandalan dalam penyusunan laporan keuangan dilakukan rekonsiliasi.

Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Rekonsiliasi dilaksanakan untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya perbedaan/selisih pencatatan yang dapat berdampak pada menurunnya validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan.

Rekonsiliasi pada Unit Akuntansi dan Pelaporan di Kementerian Negara/Lembaga dibagi menjadi dua, yaitu rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal. Rekonsiliasi internal dilaksanakan antar subsistem pada masing-masing Unit Akuntansi, sedangkan rekonsiliasi eksternal dilakukan antara UAKPA/Satker dengan UAKBUN Daerah/KPPN.

Rekonsiliasi eksternal tahun 2022 dilakukan menggunakan aplikasi baru yaitu MonSAKTI yang menggantikan aplikasi e-Rekon&LK yang digunakan dalam pelaksanaan rekonsiliasi tahun-tahun sebelumnya. Penggunaan aplikasi MonSAKTI mengiringi penerapan aplikasi SAKTI *full module* termasuk modul pelaporan pada tahun 2022. Berdasarkan monitoring data pada aplikasi MonSAKTI, sampai dengan dilaksanakannya rekonsiliasi eksternal periode Agustus 2022 masih terdapat selisih pencatatan atau Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK) yang nilainya cukup signifikan.

B. Tujuan

Sehubungan dengan masih terdapat TDK yang signifikan pada pelaksanaan rekonsiliasi eksternal dan penerapan aplikasi SAKTI *full module* yang baru diimplementasikan untuk seluruh satker pada tahun 2022, petunjuk teknis ini disusun untuk memberikan panduan kepada UAKPA/Satker dalam menyelesaikan atau memperbaiki selisih data sehingga diharapkan rekonsiliasi dapat menghasilkan data yang andal yang nantinya akan berpengaruh pada keandalan penyajian data laporan keuangan.

C. Outline

Petunjuk teknis ini terdiri dari empat bagian, yaitu bagian kesatu yang berisi Pendahuluan, bagian kedua mengenai Kebijakan Rekonsiliasi dan Transaksi Dalam Konfirmasi, bagian ketiga terkait Monitoring Transaksi Dalam Konfirmasi, dan diakhiri dengan bagian keempat yang membahas tentang Tata Cara Penyelesaian Transaksi Dalam Konfirmasi.

D. Referensi Peraturan

Beberapa peraturan yang menjadi rujukan dari penyusunan petunjuk teknis ini adalah:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga; dan
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2020 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI.

KEBIJAKAN REKONSILIASI DAN TRANSAKSI DALAM KONFIRMASI

A. Kebijakan Rekonsiliasi dengan MonSAKTI

Seiring dengan penerapan SAKTI *full module* pada tahun 2022, rekonsiliasi eksternal antara KPPN (selaku UAKBUN-Daerah) dan Satker/UAKPA dilakukan dengan membandingkan data yang terdapat pada SPAN (Sistem Akuntansi Pusat/SiAP pada BUN) dengan data pada SAKTI (Sistem Akuntansi Instansi/SAI pada K/L). Rekonsiliasi eksternal mulai tahun 2022 ini dilakukan melalui aplikasi MonSAKTI. Data SPAN dan SAKTI secara periodik akan ter-*push* ke Aplikasi MonSAKTI secara otomatis (tidak melalui proses unggah data). Masing-masing satker diharapkan dapat memonitor hasil rekonsiliasi secara berkala dan melakukan tindak lanjut yang diperlukan dalam hal masih terdapat perbedaan/selisih pencatatan (TDK). Dalam hal tidak terdapat selisih pada masing-masing elemen data rekonsiliasi, khususnya pada TDK Rupiah dan TDK CoA, sistem akan menghasilkan Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) secara otomatis pada periode penerbitan SHR.

B. Elemen Data Rekonsiliasi

Jenis-jenis elemen data yang dilakukan rekonsiliasi pada aplikasi MonSAKTI adalah sebagai berikut:

1. Pagu Belanja

Data pagu belanja yang dibandingkan berupa kode BA, Es1, Kode Satker, Program, Kegiatan, Output, Akun, Jumlah Rupiah, Jenis Kewenangan, Sumber Dana, dan Cara Penarikan antara data SPAN dengan SAKTI

2. Belanja

Data belanja yang dibandingkan berupa kode Satker, KPPN, Akun, Program, Output, Dana, Jenis Kewenangan, BA, Es1, dan jumlah rupiah antara data SPAN dengan SAKTI.

3. Pengembalian Belanja

Data pengembalian belanja yang dibandingkan berupa kode Satker, KPPN, Akun, Program, Output, Dana, Jenis Kewenangan, BA, Es1, dan jumlah rupiah antara data SPAN dengan SAKTI.

4. Estimasi Pendapatan

Data Estimasi Pendapatan Bukan Pajak yang dibandingkan berupa kode BA, Es1, satker, KPPN, akun, dan jumlah rupiah antara data SPAN dan SAKTI.

5. Pendapatan Bukan Pajak

Data Pendapatan Bukan Pajak yang dibandingkan berupa kode KPPN, Akun, BA, Es1, dan jumlah rupiah antara data SPAN dan SAKTI.

6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

Data Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak yang dibandingkan berupa kode Satker, KPPN, Akun, BA, Es1, dan jumlah rupiah antara data SPAN dan SAKTI.

7. Pengembalian Pajak

Data Pengembalian Pendapatan Pajak yang dibandingkan berupa kode Satker, KPPN, Akun, BA, Es1, dan jumlah rupiah antara data SPAN dan SAKTI.

8. Mutasi Uang Persediaan

Penyandingan data mutasi transaksi UP/GUP/TUP antara yang terdapat pada Neraca SAI dan Neraca SiAP.

9. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dibandingkan antara saldo yang terdapat pada Neraca SAI dan Neraca SiAP.

10. Kas pada Badan Layanan Umum

Saldo Kas pada Badan Layanan Umum dibandingkan antara saldo yang terdapat pada Neraca SAI dengan Neraca SiAP. Apabila terdapat selisih yang disebabkan Satker BLU melakukan reklasifikasi Kas pada BLU menjadi aset yang lain (misalnya menjadi investasi jangka pendek atau dana yang dibatasi penggunaannya) maka pada saat pelaksanaan rekonsiliasi, satker BLU harus menjelaskan selisih tersebut.

11. Kas Lainnya di K/L dari Hibah

Saldo Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah dibandingkan antara saldo yang terdapat pada Neraca SAI dengan Neraca SiAP.

12. Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga

Data Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga yang dibandingkan paling sedikit berupa Kode BA, ES1, Satker, KPPN, Akun, dan Jumlah Rupiah.

C. Jenis-jenis TDK

1. TDK Rupiah

TDK Rupiah merupakan penyajian selisih data secara nilai rupiah (Nilai Rupiah SPAN dan Nilai Rupiah SAKTI) per elemen data rekonsiliasi.

2. TDK CoA

TDK CoA (*Chart of Account*) merupakan penyajian selisih data antara SPAN dan SAKTI yang memerlukan tindak lanjut hingga tingkat COA. Elemen data yang direkonsiliasi pada TDK CoA meliputi kode SDCP, kode program, kode kegiatan, kode output, kode akun, dan nilai rupiah.

3. TDK Detail

TDK Detail merupakan penyajian selisih data antara SPAN dan SAKTI yang memerlukan tindak lanjut hingga tingkat COA dan pencatatan tanggal serta nomor dokumen sumber. Elemen data yang direkonsiliasi pada TDK Detail meliputi kode SDCP, kode program, kode kegiatan, kode output, kode akun, nomor dokumen, tanggal buku, dan nilai rupiah.

D. Pengecualian TDK

Dalam hal terdapat TDK yang bukan disebabkan oleh kesalahan dari satker dan/atau adanya penyajian data TDK yang tidak dapat dilakukan perbaikan secara sistem pada aplikasi SAKTI/SPAN, selanjutnya berdasarkan analisis data tersebut, secara kebijakan penerbitan SHR dapat dilakukan persetujuan oleh KPPN.

Mekanisme persetujuan yang dilakukan oleh KPPN dilakukan sebagai berikut :

1. Satker melakukan analisa terhadap selisih/TDK, dan jika berdasarkan hasil analisis tersebut memenuhi kriteria penerbitan SHR dengan persetujuan KPPN, Satker mengajukan "Permintaan Persetujuan Rekonsiliasi" dengan memilih alasan yang tersedia atas penyebab perbedaan data/TDK berkenaan.
2. KPPN melakukan analisis atas pengajuan "Permintaan Persetujuan Rekonsiliasi" dari Satker. Apabila telah sesuai selanjutnya KPPN dapat menerbitkan SHR dengan catatan. Dalam hal alasan perbedaan data yang diajukan oleh Satker belum sesuai, maka KPPN dapat melakukan penolakan atas pengajuan "Permintaan Persetujuan Rekonsiliasi" dari Satker dan berkoordinasi secara informal dengan Satker untuk memilih alasan yang sesuai.

Alasan perbedaan data yang termasuk dalam pengecualian TDK antara lain:

1. Data setoran/belanja belum masuk ke SiAP.
2. Data koreksi dibukukan berbeda antara Satker dengan KPPN
3. Data jurnal balik pada SAKTI tidak sesuai (Satker salah melakukan hapus pencatatan)
4. Data setoran tidak diakui Satker dengan Surat Pernyataan Tidak Mengakui
5. Data estimasi PNBPN SAKTI sudah benar sesuai dokumen sumber
6. Selisih dikarenakan perbedaan perlakuan pembulatan SP2D Valas SAKTI dengan SPAN
7. Selisih karena data SAKTI *double*
8. Selisih belanja karena sisa pagu tidak mencukupi ketika kurs SP2D
9. Terdapat SP2D atas SPM THR yang jurnalnya tidak sesuai/tidak terbentuk
10. Tanggal Revisi DIPA berbeda antara SAKTI dengan SPAN
11. Pengembalian belanja belum bisa direkam di SAKTI
12. Kas hibah berbeda karena sedang proses likuidasi

MONITORING TRANSAKSI DALAM KONFIRMASI

Salah satu tahap di dalam penyusunan laporan keuangan satker dengan menggunakan Aplikasi SAKTI ialah rekonsiliasi. Rekonsiliasi dibutuhkan guna memastikan keandalan data transaksi pelaksanaan anggaran yang tersaji di laporan keuangan. Guna pelaksanaan rekonsiliasi tersebut, Aplikasi MonSAKTI menyediakan fitur rekonsiliasi yang dapat digunakan oleh satker dalam memonitor pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan mengenai rekonsiliasi.

A. Login Aplikasi MonSAKTI

Terdapat dua opsi dalam *login* Aplikasi Monsakti, yaitu dengan menggunakan user OMSPAN dan *user* SAKTI. Dalam operasionalisasi Aplikasi Monsakti, pengguna disarankan menggunakan user SAKTI yang dimiliki. Langkah-langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut:

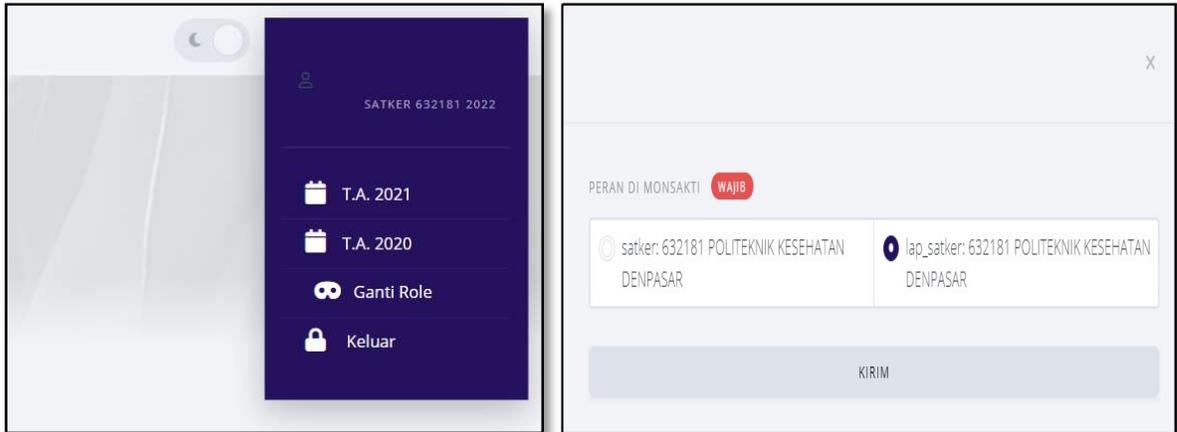
1. Buka *browser* dan masukkan alamat <https://monsakti.kemenkeu.go.id/> di *address bar*.
2. Setelah halaman indentifikasi user muncul, pengguna memilih “Gunakan Akun SAKTI”



3. Halaman identifikasi user SAKTI kemudian akan muncul. Pengguna memasukkan *user* dan *password* SAKTI yang dimiliki serta kode *captcha* yang tertera.



- Setelah *login* berhasil, pilih menu profil di pojok kanan atas kemudian pilih menu “Ganti Role”. Kemudian satker memilih peran “lap_satker:Kodesatker Nama Satker”.



- Pilih submenu “Rekon SAKTI-SPAN” untuk melihat hasil rekonsiliasi antara SAKTI dan SPAN



B. Monitoring TDK Level Satker

TDK adalah transaksi-transaksi yang membutuhkan konfirmasi lebih lanjut akan kebenaran (eksistensi) transaksi maupun kodifikasi yang terdapat di dalam suatu transaksi. TDK dihasilkan dari pelaksanaan rekonsiliasi data antara SAKTI dan SPAN. Keberadaan TDK pada Aplikasi MonSAKTI di periode tertentu dapat menjadi indikasi perlunya perbaikan data pada laporan keuangan di periode tersebut. Adapun jenis-jenis TDK hasil pelaksanaan rekonsiliasi yang dapat dimonitor pada Aplikasi Monsakti adalah sebagai berikut:

- TDK Rupiah
- TDK CoA
- TDK Detail

Berikut adalah hasil tampilan *monitoring* Rekonsiliasi pada Aplikasi Monsakti.

NO	BAES1	KODE SATKER	NAMA SATKER	1 PERIODE	2 STATUS REKONSILIASI	JUMLAH DATA TDK			6 AKSI
						3 TDK RUPIAH	4 TDK COA	5 TDK DETAIL	
1	06001	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	2022-01	Bukan Periode Penerbitan SHR	0	0	2	
2	06001	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	2022-02	Bukan Periode Penerbitan SHR	0	0	2	
3	06001	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	2022-03	Bukan Periode Penerbitan SHR	0	0	6	
4	06001	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	2022-04	Bukan Periode Penerbitan SHR	0	0	56	
5	06001	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	2022-05	Bukan Periode Penerbitan SHR	0	0	82	
6	06001	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	2022-06	Bukan Periode Penerbitan SHR	0	0	172	
7	06001	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	2022-07	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	0	0	176	Download
8	06001	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	2022-08	Rekon Selesai, Belum Tutup Periode	0	0	180	Download
9	06001	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	2022-09	Bukan Periode Penerbitan SHR	5	15	212	

Keterangan:

- 1 Periode : Periode data yang dilakukan rekonsiliasi. Batasan periode rekonsiliasi ditetapkan melalui surat pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi.
- 2 Status Rekonsiliasi : Status rekonsiliasi adalah status rekonsiliasi untuk satu periode rekonsiliasi tertentu pada saat *monitoring* rekonsiliasi dilakukan. Terdapat beberapa status rekonsiliasi yang terdapat di Aplikasi MonSAKTI.
 - a. **Bukan Periode Penerbitan SHR** adalah kondisi periode rekonsiliasi untuk periode berkenaan belum dimulai atau kondisi di mana SHR belum terbit dan sudah tidak berada dalam periode rekonsiliasi berkenaan.
 - b. **Proses Rekon Belum Selesai, Masih Terdapat Perbedaan** adalah status rekon yang masih terdapat selisih sehingga membutuhkan tindak lanjut berupa perbaikan data yang selisih atau Pengajuan Permintaan Persetujuan Rekonsiliasi ke KPPN.
 - c. **Permintaan Persetujuan Rekonsiliasi** adalah status di mana satker sedang mengajukan Permintaan Persetujuan Rekonsiliasi ke KPPN atas TDK hasil rekonsiliasi.
 - d. **Permintaan Persetujuan Rekonsiliasi Ditolak** adalah status di mana Permintaan Persetujuan Rekonsiliasi atas data TDK yang diajukan oleh satker ditolak oleh KPPN.
 - e. **Rekon Selesai, Belum Tutup Periode** adalah status rekon di mana proses rekon telah selesai namun satker belum melakukan tutup periode di Modul GLP untuk periode berkenaan.
 - f. **Rekon Selesai, Hasil Rekonsiliasi Terbentuk** adalah status rekon di mana satker telah selesai menyelesaikan proses rekonsiliasi dan telah terbit SHR.
 - g. **Satker Dikenai Sanksi** adalah status di mana satker belum menyelesaikan proses rekonsiliasi hingga batas waktu

rekonsiliasi yang ditetapkan sehingga KPPN mengenakan sanksi sesuai ketentuan mengenai rekonsiliasi.

h. Sanksi Satker Sudah Dicabut adalah status di mana KPPN telah mencabut sanksi yang dikenakan kepada satker.

3 TDK Rupiah : TDK dengan selisih terletak nilai rupiah transaksi pada semua elemen rekonsiliasi. Untuk mengetahui TDK tersebut, perhatikan pada kolom “TDK Rupiah” yang berwarna merah kemudian klik yang berwarna merah. TDK Rupiah merupakan persyaratan penerbitan SHR baik secara otomatis maupun melalui persetujuan KPPN.

NO	BAES1	KODE SATKER	NAMA SATKER	PERIODE	STATUS REKONSILIASI	JUMLAH DATA TDK	
						TDK RUPIAH	TDK COA
1	06001	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	2022-01	Bukan Periode Penerbitan SHR	0	0
2	06001	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	2022-02	Bukan Periode Penerbitan SHR	0	0
3	06001	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	2022-03	Bukan Periode Penerbitan SHR	0	0
4	06001	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	2022-04	Bukan Periode Penerbitan SHR	0	0
5	06001	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	2022-05	Bukan Periode Penerbitan SHR	0	0
6	06001	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	2022-06	Bukan Periode Penerbitan SHR	0	0
7	06001	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	2022-07	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	0	0
8	06001	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	2022-08	Rekon Selesai, Belum Tutup Periode	0	0
9	06001	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	2022-09	Bukan Periode Penerbitan SHR	5	15

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	JENIS REKON	NILAI SPAN	NILAI SAKTI	SELISIH
1	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	Pagu Belanja	160.597.624,000	160.597.624,000	0
2	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	Belanja	89.040.114,379	76.604.504,610	-12.435.609,769
3	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	Pengembalian Belanja	-37	-37	0
4	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	Estimasi Pendapatan	132.819.404,000	132.819.404,000	0
5	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	Pendapatan Bukan Pajak	77.788.949,312	66.658.068,536	-11.130.880,776
6	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	Mutasi Uang Persediaan	15.000,000	118.541,339	103.541,339
9	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	Kas di Bendahara Pengeluaran	15.000,000	118.541,339	103.541,339
10	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	Kas pada Badan Layanan Umum	99.186.337,377	100.285.301,781	1.098.964,404
11	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	Pengesahan Hibah Langsung Barang/jasa/Surat Berharga	0	0	0

4 TDK CoA : TDK dengan selisih terletak pada segmen CoA untuk seluruh transaksi yang menjadi elemen rekonsiliasi. Untuk melihat selisih tersebut, satker mengi-klik angka pada kolom TDK CoA yang berwarna merah seperti gambar di bawah ini. TDK CoA merupakan persyaratan penerbitan SHR baik secara otomatis maupun melalui persetujuan KPPN.

NO	BAES1	KODE SATKER	NAMA SATKER	PERIODE	STATUS REKONSILIASI	JUMLAH DATA TDK			AKSI
						TDK RUPIAH	TDK COA	TDK DETAIL	
1	06001	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	2022-01	Bukan Periode Penerbitan SHR	0	0	2	
2	06001	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	2022-02	Bukan Periode Penerbitan SHR	0	0	2	
3	06001	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	2022-03	Bukan Periode Penerbitan SHR	0	0	6	
4	06001	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	2022-04	Bukan Periode Penerbitan SHR	0	0	56	
5	06001	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	2022-05	Bukan Periode Penerbitan SHR	0	0	82	
6	06001	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	2022-06	Bukan Periode Penerbitan SHR	0	0	172	
7	06001	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	2022-07	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	0	0	176	Download
8	06001	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	2022-08	Rekon Selesai, Belum Tutup Periode	0	0	180	Download
9	06001	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	2022-09	Bukan Periode Penerbitan SHR	5	15	212	

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	JENIS REKON	KODE SDPC	KODE PROGRAM	KODE KEGIATAN	KODE OUTPUT	KODE AKUN	NILAI SPAN	NILAI SAKTI	SELISIH
1	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	Belanja	010	BP	5059	EBA	523121	353.680.800	273.980.550	-79.700.250
2	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	Belanja	010	BQ	3128	EBA	521112	81.587.250	71.179.000	-10.408.250
3	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	Belanja	010	WA	3072	BAA	521119	786.562.581	762.721.492	-23.841.089
4	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	Belanja	010	WA	3073	EBA	511179	671.661.000	579.846.000	-91.815.000
5	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	Belanja	060	BP	5062	CBM	537113	3.322.284.200	6.740.000	-3.315.544.200
6	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	Belanja	060	WA	3072	BAA	525111	7.506.281.987	6.926.918.069	-579.363.918
7	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	Belanja	060	WA	3072	BAA	525112	3.740.914.476	2.753.307.851	-987.606.625
8	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	Belanja	060	WA	3072	BAA	525113	35.389.394.389	30.895.734.641	-4.493.659.748
9	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	Belanja	060	WA	3072	BAA	525114	1.610.331.605	1.276.708.150	-333.623.455
10	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	Belanja	060	WA	3072	BAA	525115	243.392.200	220.368.200	-23.024.000
11	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	Belanja	060	WA	3072	BAA	525119	8.898.329.181	8.034.418.678	-863.910.503
12	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	Belanja	060	WA	3072	BAA	525129	10.267.048.536	8.633.935.805	-1.633.112.731
13	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	Kas di Bendahara Pengeluaran	000	00	0000	000	111613	0	103.541.339	103.541.339
14	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	Kas pada Badan Layanan Umum	000	00	0000	000	1	99.186.337.377	100.285.301.781	1.098.964.404
15	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	Pendapatan Bukan Pajak	000	00	0000	000	424111	66.534.190.040	55.403.309.264	-11.130.880.776

5 TDK Detail : TDK yang berisi selisih yang mencakup seluruh elemen data yang terdapat dalam suatu transaksi, yang meliputi selisih nilai rupiah, selisih Segmen CoA, selisih Nomor Dokumen, dan selisih Tanggal Buku. Untuk menampilkan selisih tersebut, operator dapat mengklik angka pada kolom TDK Detail seperti gambar di bawah ini. TDK Detail bukan merupakan persyaratan penerbitan SHR baik secara otomatis maupun melalui persetujuan KPPN.

NO	BAES1	KODE SATKER	NAMA SATKER	PERIODE	STATUS REKONSILIASI	JUMLAH DATA TDK			AKSI
						TDK RUPIAH	TDK COA	TDK DETAIL	
1	06001	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	2022-01	Bukan Periode Penerbitan SHR	0	0	2	
2	06001	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	2022-02	Bukan Periode Penerbitan SHR	0	0	2	
3	06001	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	2022-03	Bukan Periode Penerbitan SHR	0	0	6	
4	06001	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	2022-04	Bukan Periode Penerbitan SHR	0	0	56	
5	06001	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	2022-05	Bukan Periode Penerbitan SHR	0	0	82	
6	06001	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	2022-06	Bukan Periode Penerbitan SHR	0	0	172	
7	06001	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	2022-07	Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbentuk	0	0	176	Download
8	06001	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	2022-08	Rekon Selesai, Belum Tutup Periode	0	0	180	Download
9	06001	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	2022-09	Bukan Periode Penerbitan SHR	9	15	212	

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	JENIS REKON	KODE SDPC	KODE PROGRAM	KODE KEGIATAN	KODE OUTPUT	KODE AKUN	NOMOR DOKUMEN	TGL BUKU	NILAI SPAN	NILAI SAKTI	SELISIH
1	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	Belanja	060	WA	3072	BAA	525112	2213633080000001	30-MAR-22	0	266.275.965	-266.275.965
2	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	Belanja	060	WA	3072	BAA	525112	2213633080000001	31-MAR-22	266.275.965	0	266.275.965
3	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	Belanja	060	WA	3072	BAA	525129	2213633080000006	06-APR-22	0	17.330.470	-17.330.470
4	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	Belanja	060	WA	3072	BAA	525121	2213633080000007	06-APR-22	0	290.538.650	-290.538.650
5	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	Belanja	060	BP	3084	CAF	537112	2213633080000008	07-APR-22	0	157.058.000	-157.058.000
6	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	Belanja	060	WA	3072	BAA	525121	2213633080000007	07-APR-22	290.538.650	0	290.538.650
7	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	Belanja	060	WA	3072	BAA	525129	2213633080000006	07-APR-22	17.330.470	0	17.330.470
8	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	Belanja	060	WA	3072	BAA	525112	2213633080000012	08-APR-22	0	10.835.000	-10.835.000
9	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	Belanja	060	WA	3072	BAA	525114	2213633080000010	08-APR-22	0	31.687.000	-31.687.000
10	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	Belanja	060	WA	3072	BAA	525112	2213633080000011	08-APR-22	0	600.743.350	-600.743.350
11	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	Belanja	060	WA	3072	BAA	525114	2213633080000009	08-APR-22	0	50.000	-50.000
12	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	Belanja	060	WA	3072	BAA	525119	2213633080000012	08-APR-22	0	1.381.593.674	-1.381.593.674
13	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	Belanja	060	WA	3072	BAA	525115	2213633080000012	08-APR-22	0	665.000	-665.000
14	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	Belanja	060	WA	3072	BAA	525113	2213600000000014	08-APR-22	0	8.532.283.778	-8.532.283.778
15	646307	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	Belanja	060	BP	3084	CAF	537112	2213633080000008	11-APR-22	157.058.000	0	157.058.000

- 6 Aksi : Adalah kolom yang disediakan untuk menindaklanjuti TDK Rupiah atau TDK CoA yang terdapat di dalam *monitoring*. Dalam hal terdapat selisih pada TDK Rupiah dan/atau TDK CoA maka sistem otomatis akan muncul *icon* "Permintaan Persetujuan Rekonsiliasi". *Icon* ini dapat digunakan oleh Satker dalam hal TDK Rupiah dan/atau TDK CoA tersebut bukan disebabkan kesalahan Satker atau perbedaan tidak dapat dilakukan perbaikan secara aplikasi.

TATA CARA PENYELESAIAN TRANSAKSI DALAM KONFIRMASI

Dalam pelaksanaan rekonsiliasi eksternal, TDK yang terjadi disebabkan beberapa kondisi yang berbeda. Berikut akan dibahas penyebab TDK pada masing-masing elemen data yang dilakukan rekonsiliasi beserta tata cara penyelesaian TDK tersebut.

1. Pagu Belanja

TDK pada Pagu Belanja disebabkan oleh perbedaan tanggal pembukuan Revisi DIPA antara yang tercatat di SAKTI dengan yang tercatat di SPAN. Perbedaan tanggal buku Pagu Belanja antara SAKTI dan SPAN akan menyebabkan TDK Detail. Pada beberapa kasus, perbedaan tanggal buku antara SAKTI dan SPAN dapat terjadi lintas bulan sehingga selain terdapat TDK Detail, juga akan menyebabkan TDK Rupiah.

Terhadap TDK Pagu Belanja yang disebabkan oleh perbedaan tanggal buku Revisi DIPA, sementara ini tidak dapat diperbaiki oleh satker karena tanggal buku terbentuk *by system* sehingga dikecualikan dari syarat penerbitan Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR).

2. Belanja

Ada beberapa penyebab terjadinya TDK Belanja, antara lain:

a. Satker Belum Catat SP2D

TDK Belanja dapat terjadi ketika Satker belum melakukan pencatatan SP2D di SAKTI. Dalam hal ini, Satker harus memperbaiki data di SAKTI dengan cara operator Modul Pembayaran melakukan catat SP2D. Terdapat dua cara untuk melakukan pencatatan SP2D di Modul Pembayaran sebagai berikut:

- 1) Operator memilih SPM dan klik Catat SP2D Otomatis. Pencatatan SP2D dengan cara ini dapat diakses oleh operator Modul Pembayaran melalui menu Pembayaran → Catat/Upload → Mencatat/Upload SP2D.

No. SPM	Tanggal SPM	Jenis SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D
00007A	20-01-2022	311 - UP			180.000,000
00005A	17-01-2022	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL			152.505,818
00004A	13-01-2022	211 - GAJI INDIK.			397.932,600
00001A	3-01-2022	211 - GAJI INDIK.			398.496,500

Catat No. SP2D Manual

No SPM: 00001A
No SP2D:
Nilai SP2D: 398.496.500
Kode Valas: IDR
Nilai Rupiah: 398.496.500

Tanggal SPM: 03 Jan 2022
Tanggal SP2D: 03 Jan 2022
Nilai Kurs: 0
Tanggal Kurs:

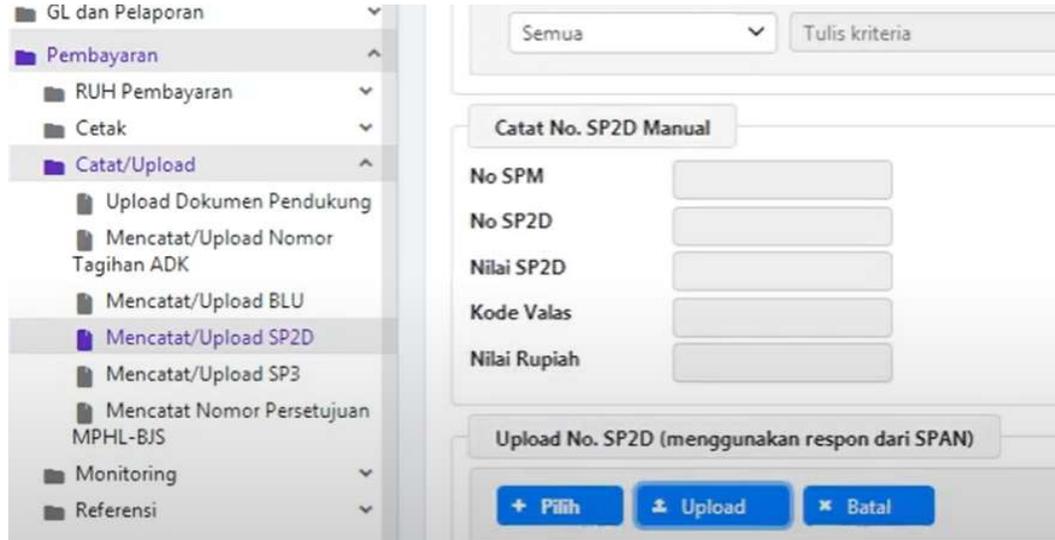
Upload No. SP2D (menggunakan respon dari SPAN)

+ Pilih Upload * Batal

Catat SP2D Otomatis

- 2) Operator memilih data SP2D Satker yang terdapat di OMSPAN kemudian mengunduh data dalam format XML, untuk selanjutnya *file* XML tersebut diunggah ke Aplikasi SAKTI. Pencatatan SP2D dengan cara ini dapat diakses oleh operator

Modul Pembayaran melalui menu Pembayaran → Catat/Upload → Mencatat/Upload SP2D.



Sebelum melakukan catat SP2D, Satker agar memastikan bahwa Modul GLP pada periode tanggal SP2D berkenaan masih dalam status terbuka (belum tutup buku). Apabila Satker telah melakukan Tutup Buku Sementara pada Modul GLP, Satker agar melakukan Buka Periode terlebih dahulu sebelum dapat melakukan catat SP2D. Dalam hal Satker telah melakukan Tutup Buku Permanen, Satker agar mengajukan tiket ke HAI-DJPb untuk diturunkan statusnya menjadi Tutup Buku Sementara dan selanjutnya Satker melakukan Buka Periode secara mandiri.

b. Koreksi SP2D

TDK Belanja dapat terjadi saat satker melakukan koreksi SPM/SP2D namun belum melakukan pencatatan atas SP2D yang telah dikoreksi sehingga timbul TDK CoA di MonSAKTI. Pada kasus tersebut, Satker agar melakukan pencatatan SP2D yang baru di Modul Pembayaran melalui menu Pembayaran → Catat/Upload → Mencatat Persetujuan SP2D Koreksi.

3. Pengembalian Belanja

TDK Pengembalian Belanja dapat disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

a. Satker Belum Catat Setoran

Untuk pengembalian belanja yang dilakukan melalui setoran ke Kas Negara, Satker harus merekam pengembalian belanja tersebut secara manual di Modul Bendahara SAKTI melalui menu Bendahara → Setoran → Pengembalian Belanja.

b. Satker Belum Catat SP2D

Selain melalui penyeteroran ke Kas Negara, pengembalian belanja juga dapat dilakukan melalui potongan SPM. Dalam hal Satker belum melakukan catat SP2D yang di dalamnya terdapat potongan SPM pengembalian belanja, maka akan terjadi TDK Pengembalian Belanja. Pada kasus ini Satker agar segera melakukan pencatatan SP2D di Modul Pembayaran SAKTI.

4. Pendapatan Bukan Pajak

TDK Pendapatan Bukan Pajak dapat terjadi karena beberapa hal sebagai berikut:

a. Satker Belum Catat Setoran

Dalam hal TDK Pendapatan Bukan Pajak terjadi karena Satker belum melakukan pencatatan setoran, Satker agar segera melakukan penginputan setoran melalui menu Setoran SBS/Setoran Non SBS/Upload MPN.

Menu Setoran SBS digunakan untuk mencatat setoran melalui bendahara yang kas masuknya dicatat pada Modul Bendahara, sedangkan menu Setoran Non SBS digunakan untuk mencatat setoran yang dilakukan langsung ke Kas Negara (tidak melalui bendahara). Selanjutnya menu Upload MPN digunakan untuk mengunggah data setoran/penerimaan yang telah diunduh dari Aplikasi MPN.

Menu Setoran SBS dan Setoran Non SBS untuk Pendapatan Bukan Pajak yang disetor oleh Bendahara Pengeluaran dapat diakses pada Modul Bendahara SAKTI melalui menu Bendahara → Setoran → Setoran UP/TUP/PNBP Bendahara Pengeluaran.

Menu Setoran SBS dan Setoran Non SBS untuk Pendapatan Bukan Pajak yang disetor oleh Bendahara Penerimaan dapat diakses pada Modul Bendahara SAKTI melalui menu Bendahara → Setoran → Setoran PNBP Bendahara Penerimaan.

Berikutnya untuk pencatatan setoran melalui Upload MPN dapat diakses bendahara satker melalui menu Bendahara → Upload → Upload Data Penerimaan.

Pencatatan data setoran dilakukan dengan memastikan bahwa Modul GLP pada periode tanggal setoran berkenaan masih dalam status terbuka (belum tutup buku). Apabila Satker telah melakukan Tutup Buku Sementara pada Modul GLP, Satker agar melakukan Buka Periode terlebih dahulu. Dalam hal Satker telah melakukan Tutup Buku Permanen, Satker agar mengajukan tiket ke HAI-DJPb untuk diturunkan statusnya menjadi Tutup Buku Sementara dan selanjutnya Satker melakukan Buka Periode secara mandiri.

b. Kesalahan Input CoA

Satker yang memiliki TDK yang disebabkan karena kesalahan penginputan yang tidak sesuai dengan dokumen sumber (kode akun/NTPN/tanggal buku) diharapkan dapat segera melakukan perbaikan data dengan melakukan input sesuai dokumen sumber.

c. Koreksi Penerimaan Negara

Satker yang memiliki TDK Pendapatan Bukan Pajak karena melakukan koreksi penerimaan negara, agar menyesuaikan data yang diinput di SAKTI dengan data setoran yang telah dilakukan koreksi di KPPN. Selanjutnya Satker menyesuaikan tanggal buku setoran di SAKTI sesuai dengan tanggal koreksi yang tercatat di sistem SPAN.

Saat Satker melakukan koreksi setoran dan koreksi tersebut telah dieksekusi oleh KPPN, Satker agar menghapus data setoran yang lama, kemudian melakukan input secara manual data setoran yang telah dikoreksi melalui menu Setoran SBS/Non SBS. Data yang direkam disamakan dengan data koreksi yang telah dilakukan. Pada kolom

pengesahan setoran (NTPN, NTB, Kode Billing) data direkam secara manual tanpa melakukan Klik Tombol Pencarian MPN.

Pada kasus **koreksi penerimaan negara, Satker tidak dapat melakukan pencatatan koreksi setoran melalui menu Upload MPN** karena menu tersebut hanya dapat digunakan untuk mengunggah data awal atau data setoran semula yang belum dikoreksi.

d. **Kesalahan Penggunaan Menu Setoran**

Kesalahan penggunaan menu pencatatan setoran yang tepat dapat mengakibatkan setoran dobel catat sehingga muncul TDK Pendapatan Bukan Pajak. Kasus ini dapat terjadi ketika Satker mencatat kas masuk di Modul Bendahara kemudian merekam data penerimaan negara pada menu Setoran Non SBS. Kemudian Bendahara Satker mencatat lagi setoran tersebut melalui menu Setoran SBS untuk menyesuaikan pencatatan kas di Modul Bendahara. Dalam kasus ini solusi yang harus dilakukan oleh Satker ialah dengan menghapus salah satu setoran yang dobel tersebut dan memastikan hanya tersisa satu data setoran sesuai dokumen sumber.

5. Kas di Bendahara Pengeluaran

TDK Kas di Bendahara Pengeluaran terjadi karena hal-hal sebagai berikut:

a. **Satker Belum Catat Pengembalian UP/TUP**

TDK Kas di Bendahara Pengeluaran dapat disebabkan Satker belum melakukan pencatatan atas transaksi pengembalian UP/TUP ke Kas Negara. Dalam hal ini Satker wajib mencatat transaksi tersebut di Modul Pembayaran SAKTI melalui menu Bendahara → Setoran → Setoran UP/TUP/PNBP Bendahara Pengeluaran.

b. **Selisih Kurs Satker Luar Negeri**

Penyebab TDK Kas di Bendahara Pengeluaran yang sering terjadi ialah karena selisih kurs saat transaksi. Pada akhir periode pelaporan, Satker melakukan revaluasi nilai Kas di Bendahara Pengeluaran menyesuaikan dengan kurs saat tanggal pelaporan dan saldo Kas BP yang tercatat di sistem SPAN dengan cara melakukan jurnal manual di Modul GLP sehingga nilainya sama dan tidak lagi terjadi TDK Kas di Bendahara Pengeluaran.

6. Mutasi Uang Persediaan

Penyebab terjadi TDK dan tata cara penyelesaian TDK Mutasi Uang Persediaan sama dengan yang terjadi pada TDK Kas di Bendahara Pengeluaran.

7. Kas pada Badan Layanan Umum

TDK Kas BLU terjadi karena Satker belum melakukan catat SP2B BLU. Dalam hal ini Satker harus segera melakukan pencatatan atas SP2B BLU yang telah diterbitkan KPPN untuk menghindari TDK. Pencatatan SP2B dilakukan oleh operator Modul Pembayaran melalui menu Pembayaran → Catat/Upload → Mencatat/Upload BLU.

8. Kas Lainnya di KL dari Hibah

TDK Kas Lainnya di KL dari Hibah disebabkan karena Satker belum melakukan input/pencatatan atas SPHL yang telah diterbitkan KPPN. Dalam hal ini Satker wajib mencatat SPHL tersebut di SAKTI pada Modul Pembayaran.

9. Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga

TDK pada Pengesahan Hibah Langsung B/J/S disebabkan Satker belum melakukan pencatatan atas MPHL-BJS yang telah diterbitkan KPPN. Dalam hal ini Satker agar melakukan pencatatan di Modul Pembayaran SAKTI melalui menu Pembayaran → Catat/Upload → Mencatat Nomor Persetujuan MPHL-BJS.